

HUBUNGAN HUKUM ANTARA MITRA STATISTIK DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN SLEMAN DAN DAMPAKNYA PADA PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MITRA STATISTIK

Oleh:

Dwi Putri Respatiningrum¹, Nailul Amany²

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui perihal hubungan hukum antara mitra statistik dengan BPS Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak hubungan hukum yang terjalin dengan BPS Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan hak jaminan sosial mitra statistik.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sementara data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada responden dan narasumber menggunakan pedoman wawancara. Analisis terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara BPS Kabupaten Sleman dengan mitra statistik adalah hubungan kerja berdasarkan PKWT dan PKWTT. Hubungan kerja berdasarkan PKWT, yakni PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, terjalin antara BPS Kabupaten Sleman dengan mitra statistik petugas sensus dan survei nonrutin yang menjalankan pekerjaan dengan sifat pekerjaan yang sekali selesai. Sementara hubungan kerja berdasarkan PKWTT terjalin antara BPS Kabupaten Sleman dengan mitra statistik petugas survei rutin fungsi. Adapun, dampak hubungan hukum terhadap perlindungan jaminan sosial mitra statistik yakni bahwasanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah seharusnya diperoleh oleh mitra statistik namun dalam pelaksanaannya masih belum terpenuhi khususnya bagi mitra statistik petugas survei rutin fungsi.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Perjanjian Kerja, PKWT, PKWTT, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

¹ Mahasiswa Strata-1 (S-1) Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***THE LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN STATISTICAL PARTNERS AND
THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS (BPS) OF SLEMAN REGENCY
AND ITS IMPACT ON THE FULFILLMENT OF SOCIAL SECURITY RIGHTS
FOR STATISTICAL PARTNERS***

By:

Dwi Putri Respatiningrum¹, Nailul Amany²

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and find out about the legal relationship between statistical partners and BPS Sleman Regency. In addition, this study also aims to determine and analyze the impact of the legal relationship established with BPS Sleman Regency on the fulfillment of statistical partners' social security rights.

This research is a descriptive research with empirical juridical research type. In this research, secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials are obtained through library research. While primary data is obtained through field research by interviewing respondents and sources using interview guidelines. The data collected from the research were analyzed qualitatively.

The results show that the legal relationship that occurs between BPS Sleman Regency and statistical partners is a working relationship based on PKWT and PKWTT. Working relationship based on PKWT, which is PKWT based on the completion of a job, is established between BPS Sleman Regency and statistical partners of non-routine census and survey officers who carry out work with the nature of work that is completed once. Meanwhile, working relationships based on PKWTT are established between BPS Kabupaten Sleman and statistical partners of routine survey officers. Meanwhile, the impact of legal relations on the protection of social security of statistical partners is that the protection of labor social security is appropriate.

Key Words: Legal Relations, Employment Agreement, PKWT, PKWTT, Employment Social Security.

¹ Undergraduate Student in Civil Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

² Lecturer in Civil Law Department at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada